

*The Effect of Budget Clarity, Human Resources Capacity and Information Technology Utilization on Regional Financial Management With The Internal Control System as an Intervening Variable*

**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening**

Oleh:

**Novica Putri<sup>1)\*</sup>, Afrizal<sup>2)</sup>, Ilham Wahyudi<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020, Jambi – Indonesia

<sup>2.&3)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: [novicaputri92@gmail.com](mailto:novicaputri92@gmail.com)<sup>1)</sup>, [afrizaldoktor@unja.ac.id](mailto:afrizaldoktor@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [Ilham\\_wahyudi@unja.ac.id](mailto:Ilham_wahyudi@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

\* Korespondensi

---

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 30 Juli 2024

Artikel Diterima: 19 Agustus 2024

---

**ABSTRACT**

*This study aimed to prove empirically the effect of clarity of budget targets, human resource capacity, and the utilization of information technology on regional financial management mediated by the internal control system. Subjects in this study were accounting entities involved in the regional financial management process starting from the officials at the Regional Apparatus Organization within the Jambi Provincial Government which planning, budgeting, implementation, accountability to reporting stages. Sampling in this study used judgment-sampling technique, sample selection based on consideration, namely the type of sample selection is not random, the information obtained was generally adjusted to the objectives or research problems. Data analysis in this study used path analysis that is a development of multiple regression analysis. The results of this study indicated that clarity of budget targets, human resource capacity, the utilization of information technology, and internal control systems had a significant effect on regional financial management. The results of this study also indicated that the clarity on budget targets, human resource capacity, and the utilization of information technology did not have indirect effect on regional financial management through internal control system as intervening variable.*

*Keywords: Regional financial management, clarity of budget targets, human resource capacity, utilization of information technology, and internal control systems.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal. Subjek dalam penelitian ini pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pelaporan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling*, pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel *intervening*.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

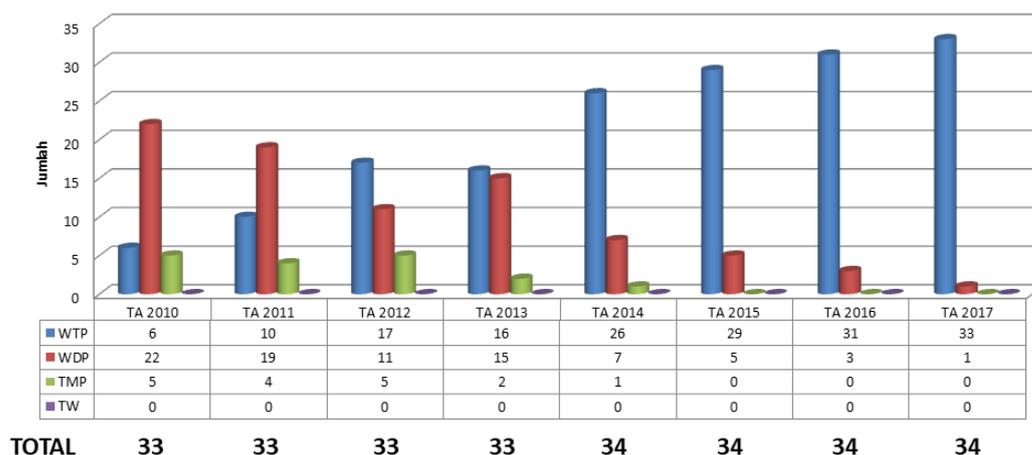
## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tidak dilaksanakan dengan baik membuka peluang untuk terjadinya korupsi yang merugikan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fenomena yang terjadi saat ini sehubungan dengan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah memperlihatkan bahwa opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK bukan merupakan jaminan tidak adanya korupsi. Berikut ini grafik peningkatan opini dari BPK di setiap provinsi di Indonesia selama 8 tahun terakhir:



Sumber: BPK RI – Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

**Gambar 1. Opini BPK atas LKPD Provinsi di Indonesia Selama 2012 s.d 2018**

Gambar di atas menunjukkan setiap tahun bertambah jumlah peraih WTP di pemerintah Provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa laporan yang dibuat semakin membaik. Meskipun demikian laporan tersebut tidak menjamin pada substansi dari maksud laporan tersebut dibuat. Bahwa laporan tersebut semestinya terbebas dari praktik *mark up*, pemborosan, dan korupsi.

Fenomena lain muncul yang diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga melibatkan auditor BPK pernah terjadi karena adanya jual beli opini memperlihatkan bahwa ada pemberian predikat WTP bukan jaminan tak ada korupsi di Kementerian dan Lembaga pemerintahan, maupun pemerintah daerah. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus dugaan suap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kasus suap di Kemendes sendiri terjadi agar opini laporan keuangan tahun 2016 mereka ditingkatkan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke WTP (Retaduari, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) memeriksa 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib

menyusun LK tahun 2016. BPK menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp.419,60 miliar, 846 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp537,72 miliar, serta 2.331 permasalahan penyimpangan administrasi (BPK RIa, 2017). Temuan ketidakpatuhan yang ditemukan BPK yang menimbulkan kerugian negara tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut masih belum memenuhi asas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pemerintah daerah harus diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya sistem pengendalian internal akan berpengaruh pada pengawasan kinerja aparat pemerintah supaya bekerja secara transparan dan akuntabel sehingga memperkecil

kemungkinan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan SPI yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah (BPK Perwakilan Jambi, 2015).

Berdasarkan observasi awal dengan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan pada bagian keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi, diantaranya pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Petugas pelaksana tidak cermat/ tidak tertib dalam melaksanakan tugas, dan dibutuhkannya kebijakan/SOP sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Kejelasan sasaran anggaran membuat aparat dituntut untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga dapat menurunkan selisih antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Menurut Kaltsum and Rohman (2012) menjelaskan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Target-target anggaran tersebut akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bernilai. Kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bagaimana kemampuan seseorang atau individu yang bekerja pada suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya sehingga mampu tujuannya secara efektif dan efisien (Karmila, Tanjung and Darlis, 2014). Kapasitas sumber daya manusia dilihat kinerja yang mampu menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) yang optimal dari pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara sementara kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan keuangan pada OPD Pemerintah Provinsi Jambi masih memiliki keterbatasan SDM yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Hal ini terlihat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran berada dimasing-masing bidang, pada bagian program hanya mengakomodir program dan kegiatan yang diajukan dari masing-masing bidang, sehingga dalam penyusunan masih belum sepenuhnya berpedoman terhadap renstra, sehingga pada saat penyusunan anggaran masih copy paste dari kegiatan

tahun sebelumnya. SDM yang diharapkan terutama masing-masing kepala bidang dalam penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Hasil temuan BPK RI (2017) menyebutkan bahwa faktor kurangnya dukungan sistem informasi juga ikut mempengaruhi terjadinya kasus-kasus ketidakpatuhan dalam penyusunan LKPD. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil putusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan menjadi lebih efektif.

Penelitian mengenai hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Pada penelitian Hanafiah, Abdullah and Saputra (2016), seluruh variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu: akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, dan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu. Penelitian Daulay, Arfan and Basri (2015) juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan dan pengawasan intern secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan OPD Kota Lhoksumawe. Dan pada penelitian Azmi, Darwanis and Abdullah (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini berusaha untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan satu variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan daerah serta satu variabel pemediasi yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dengan objek penelitian di instansi pemerintah Provinsi Jambi khususnya pada dinas-dinas di Provinsi Jambi. Pemilihan instansi Pemerintah Provinsi Jambi karena merupakan OPD yang bertugas bertanggungjawab, menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksanaan anggaran dari pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel yang *intervening* yang menghubungkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya dukungan teknologi

informasi yang memadai masih menjadi alasan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa terjadinya ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan daerah salah satunya dikarenakan masih kurangnya dukungan teknologi informasi yang memadai (BPK, 2017).

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada sisi lain, ketiga faktor di atas juga harus ditunjang oleh adanya sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat menghasilkan keluaran dari suatu pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
5. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
7. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
8. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal?
9. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal?
10. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi?
8. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.
9. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.
10. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 66 Ayat 1, mengungkapkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*), serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Menurut Darise (2009) “keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam upaya perwujudan *good governance*”.

Indikator pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator tersebut antara lain yaitu: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Nuraini dan Indudewi (2012) menjelaskan tujuan dan sasaran anggaran tersebut harus disesuaikan dengan kelima kriteria; 1) spesifik, 2) terukur, 3) menantang tapi realistis, 4) berorientasi pada hasil akhir, 5) memiliki batas waktu.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara jelas dan rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya ketidakjelasan sasaran anggaran dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi tidak menentu, sehingga menimbulkan ketidaknetanan serta ketidakpuasan dalam bekerja. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kondisi lingkungan yang tidak pasti.

#### 2.1.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kualitas usaha atau potensi kemampuan yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang, jasa dan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yaitu yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence*, *creativity*, dan *imagination* (Sutrisno, 2010).

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yaitu yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence*, *creativity*, dan *imagination* (Sutrisno, 2010). Sementara itu menurut Widyaningrum dan Rahmawati (2010) mengungkapkan bahwa kinerja dan kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat

tanggung jawab dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari adanya penjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) jabatan yang jelas. Adapun menurut Hevesi dalam Widyaningrum dan Rahmawati (2010), “kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan”

#### 2.1.4. Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengguna merupakan salah satu faktor penting dalam pengoperasian teknologi dalam suatu sistem informasi. Pengguna (*user*) adalah orang yang mengoperasikan atau menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan output berupa informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna sistem informasi. Untuk menunjang keberhasilan suatu sistem diperlukan pengguna (*user*) yang dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan baik dan benar.

Laudon (2007) menyatakan bahwa para pengguna *user* perlu mengetahui dan memahami teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasinya. Apabila pengguna memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap sistem yang digunakan pengguna akan merasa lebih memiliki sistem yang digunakan itu, sehingga mereka dapat menggunakan sistem dengan baik. Arus informasi akan tersampaikan dengan baik apabila pengguna memahami dengan baik mengenai teknologi informasi sehingga informasi dan dapat diinterpretasikan dengan baik, serta diharapkan kualitas informasi yang dihasilkan juga baik.

#### 2.1.5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses pengendalian secara internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

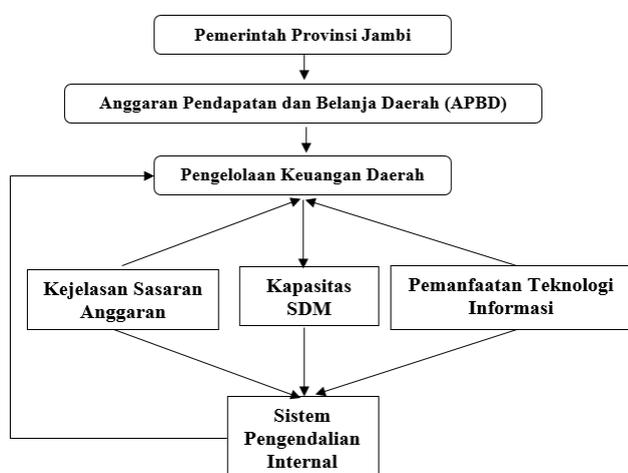
### 2.2. Kerangka Pemikiran

Kinerja pengelolaan keuangan daerah juga akan berjalan dengan optimal jika didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan

pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Meningkatnya sistem pengendalian internal akan berpengaruh pada pengawasan kinerja aparat pemerintah supaya bekerja secara transparan dan akuntabel sehingga memperkecil kemungkinan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu didukung dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah pelaksanaan pengendalian internal dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah juga akan membantu pengendalian dapat berjalan secara optimal. Pada sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu proses pengendalian lebih efektif dengan ketersediaan informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses melalui sistem informasi yang tersedia dengan bantuan komputer dan jaringan internet.

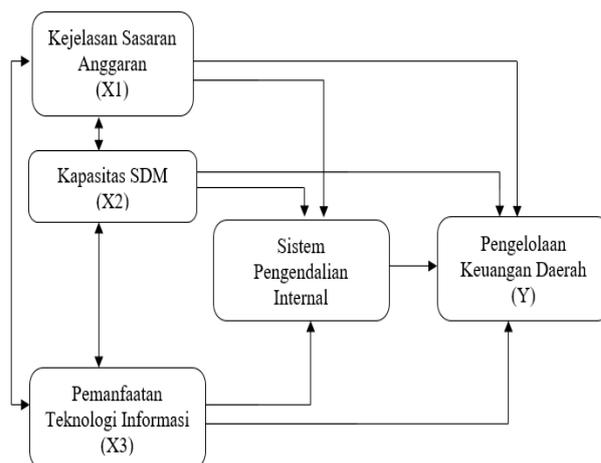
Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel independen ada 3 (tiga) terdiri dari kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal sebagai variable intervening. Model penelitian berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

**Gambar 2. Model Penelitian**

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan model penelitian di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi
- H<sub>2</sub>: Kapasitas SDM berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>4</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>5</sub>: Kapasitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>6</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>7</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
- H<sub>8</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.
- H<sub>9</sub>: Kapasitas SDM berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.
- H<sub>10</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pelaporan. Penelitian difokuskan pada kantor dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berjumlah 19 dinas dan 10 badan/kantor.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling*, pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro and Supomo, 2013). Penelitian menggunakan 1 bendahara dinas terkait, 1 kepala sub bagian keuangan, dan 1 kepala bagian tata usaha/sekretariat dinas dari 29 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga jumlah sampel keseluruhan sebanyak 87 orang.

#### 3.2. Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Singarimbun and Effendi, (2006) menjelaskan *explanatory research* yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Rancangan atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain korelasional. Studi korelasional digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain (Sudjana and Ibrahim, 2017).

#### 3.3. Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

- 1) Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ )  
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara jelas dan rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kaltsum and Rohman, 2012).. Pengukuran kejelasan sasaran anggaran menggunakan skala *Likert* skor 1 - 5 poin dengan 5 butir pertanyaan.

- 2) Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ )  
Kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Karmila, Tanjung and Darlis, 2014). Kapasitas sumber daya manusia dilihat dari tanggung jawab yang jelas, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010). Pengukuran menggunakan skala *Likert* skor 1 - 5 poin dengan 4 butir pertanyaan.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ )  
Laudon (2007) mendefinisikan penggunaan teknologi informasi sebagai orang yang mengoperasikan atau menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan *output* berupa informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna informasi. Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi dilihat dari indikator penggunaan komputer, perangkat lunak (*software*) dan pemanfaatan jaringan internet dengan menggunakan skala *Likert* skor 1 - 5 poin dengan 3 butir pertanyaan.
- 4) Sistem Pengendalian Internal ( $X_4$ )  
Sistem Pengendalian Intern dalam penelitian ini yaitu suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, 2008). Pengukuran menggunakan skala *Likert* skor 1 - 5 poin dengan 5 butir pertanyaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Indikator pengukuran pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 antara lain yaitu: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap responden diminta menjawab 7 butir pertanyaan, masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan skala *likert* skor 1 - 5 poin. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara jelas dan rinci serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. (Kaltsum and Rohman, 2012)	1. Spesifik. 2. Terukur. 3. Menantang tapi realistis. 4. Berorientasi pada hasil akhir. 5. Memiliki batas waktu. (Nuraini dan Indudewi, 2012)	Interval
Kapasitas SDM (X <sub>2</sub> )	Human Resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insan . (Sutrisno, 2010)	1. Tanggung jawab yang jelas 2. Keterampilan 3. Pengetahuan 4. Kemampuan untuk melaksanakan tugas (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010)	Interval
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>3</sub> )	Penggunaan teknologi informasi sebagai orang yang mengoperasikan atau menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan <i>output</i> berupa informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna informasi (Laudon, 2007)	1. Penggunaan komputer dan 2. Perangkat lunak 3. Jaringan internet (Yosefrinaldi, 2013)	Interval
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>4</sub> )	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, 2008)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan. (PP No. 60 Tahun 2008)	Interval
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 12 Tahun 2019)	1. Tertib 2. Efisien 3. Ekonomis 4. Efektif 5. Transparan 6. Bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, 7. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP No. 12 Tahun 2019)	Interval

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program *SPSS 24.0 for Windows*. Regresi berganda didasarkan

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiono, 2012). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X_4 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan keuangan daerah.  
 $\alpha$  = Konstanta.  
 $\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi.  
 $X_1$  = Kejelasan sasaran anggaran.  
 $X_2$  = Kapasitas SDM  
 $X_3$  = Pemanfaatan teknologi informasi  
 $X_4$  = Sistem Pengendalian Internal  
 $e$  = Error

### 3.4. Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis Efek Secara Langsung  
 Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Bila nilai signifikansi  $t <$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikansi  $t >$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Pengujian Statistik Efek Tidak Langsung

Untuk menguji signifikansi dari koefisien efek tidak langsung digunakan software yang dikembangkan oleh Sobel, yang lebih dikenal sebagai *Sobel Test*, menggunakan format sebagai terlihat pada kotak berikut ini. Pengujian menggunakan *Sobel Test* dilakukan di <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>.

Input:	Test statistic:	p-value:
a	Sobel test:	
b	Goodman (I) test:	
$s_a$	Goodman (II) test:	
$s_b$	Reset all	Calculate

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Gambar 3. Format *Sobel Test*

Keterangan

- a = Koefisien regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel mediator  
 b = Koefisien regresi pengaruh variabel mediator terhadap variabel dependen ketika variabel independen juga menjadi variabel prediktor dari variabel dependen  
 $S_a$  = Standar error dari a  
 $S_b$  = Standar error dari b.

Kriteria pengujian hipotesis yaitu apabila nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga variabel independen tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel dependennya melalui variabel mediator.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

Tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini sebesar 73,56% dimana dari 87 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 64 lembar dikembalikan. Dari kuesioner yang dikembalikan, semuanya telah terisi dengan baik dan bisa diolah untuk kepentingan analisis data hasil penelitian.

4.1.1. Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Internal  
 Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal merupakan persamaan struktural yang menyusun analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows 24.00*.

Hasil analisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Persamaan Regresi I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.202	1.744		1.836	.071
	X1	.271	.116	.303	2.337	.023
	X2	.518	.139	.415	3.742	.000
	X3	.262	.184	.171	1.425	.159

a. Dependent Variable: X4

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi pada persamaan regresi I ditentukan nilai koefisien jalur (*standardized coefficient*) untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- a.  $\beta_1 = 0,303$
- b.  $\beta_2 = 0,415$
- c.  $\beta_3 = 0,171$

Berdasarkan nilai koefisien jalur dibentuk persamaan regresi I sebagai berikut:

$$X_4 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$X_4 = 0,303X_1 + 0,415X_2 + 0,171X_3 + \epsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Kriteria keputusan dilihat nilai probabilitas dari setiap koefisien masing-masing variabel independen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 2 di atas.

- a. Nilai *probability* pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,023 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran secara signifikan mempengaruhi sistem pengendalian internal.
- b. Nilai *probability* pengaruh kapasitas SDM terhadap sistem pengendalian internal sebesar

0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, kapasitas SDM secara signifikan mempengaruhi sistem pengendalian internal.

- c. Nilai *probability* pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,159 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

4.1.2. Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda. Analisis ini untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), kapasitas SDM ( $X_2$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ) dan sistem pengendalian internal ( $X_4$ ) secara langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows 24.00*. Hasil analisis jalur pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Analisis Persamaan Regresi II**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.248	2.050		.609	.545
	X1	.375	.139	.295	2.699	.009
	X2	.370	.176	.209	2.104	.040
	X3	.525	.214	.243	2.458	.017
	X4	.350	.148	.247	2.371	.021

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi pada persamaan regresi II ditentukan nilai koefisien jalur (*standardized coefficient*) untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- a.  $\beta_1 = 0,295$
- b.  $\beta_2 = 0,209$
- c.  $\beta_3 = 0,243$
- d.  $\beta_4 = 0,247$

Berdasarkan nilai koefisien jalur dibentuk persamaan regresi II sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$Y = 0,295X_1 + 0,209X_2 + 0,243X_3 + 0,247X_4 + \epsilon$$

Pengujian koefisien jalur dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara langsung terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Kriteria keputusan dilihat nilai probabilitas dari setiap koefisien masing-masing variabel independen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3 di atas.

- a. Nilai *probability* pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,009 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran secara signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.
- b. Nilai *probability* pengaruh kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,040 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, kapasitas SDM secara

- signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Nilai *probability* pengaruh pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,017 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Nilai *probability* pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,021 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4.1.3. Analisis Pengaruh Tidak Langsung Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Pengendalian Internal

Analisis ini untuk menguji pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal. Analisis dilakukan berdasarkan hasil persamaan regresi I dan persamaan regresi II.

- 1) Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil analisis regresi pada persamaan regresi I dan persamaan regresi II ditentukan nilai koefisien jalur untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- a.  $\beta_{X_4X_1} = 0,303$   
 b.  $\beta_{X_4X_2} = 0,415$   
 c.  $\beta_{X_4X_3} = 0,171$   
 d.  $\beta_{YX_4} = 0,247$

Dari koefisien jalur tersebut dapat dihitung berapa besar pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel mediatornya. Besarnya pengaruh tidak langsung yaitu sebagai berikut:

- a. Besarnya pengaruh tidak langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

$$= (\beta_{X_4X_1})(\beta_{YX_4}) \times 100\% \\ = (0,303) \times (0,247) \times 100\% \\ = 7,48\%$$

Jadi diketahui pengaruh tidak langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebesar 7,48%

- b. Besarnya pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

$$= (\beta_{X_4X_2})(\beta_{YX_4}) \times 100\% \\ = (0,415) \times (0,247) \times 100\% \\ = 10,25\%$$

Jadi diketahui pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebesar 10,25%

- c. Besarnya pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

$$= (\beta_{X_4X_3})(\beta_{YX_4}) \times 100\% \\ = (0,171) \times (0,247) \times 100\% \\ = 4,22\%$$

Jadi diketahui pengaruh tidak langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebesar 4,22%

- 2) Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan menggunakan *Sobel Test* dilakukan di <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>. Kriteria keputusan dilihat nilai probabilitas hasil pengujian Sobel test dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%).

- a. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal dapat dilihat pada gambar berikut:

Input:		Test statistic:		Std. Error:	p-value:
a	0.271	Sobel test:	1.66198721	0.05707023	0.09651534
b	0.350	Aroian test:	1.59153438	0.05959658	0.11148936
s <sub>a</sub>	0.116	Goodman test:	1.74270914	0.05442675	0.08138443
s <sub>b</sub>	0.148	Reset all	Calculate		

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Gambar 4. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Mediasi Sistem Pengendalian Internal

Nilai *probability Sobel test* yaitu sebesar 0,09651534 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.

b. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal dapat dilihat pada gambar berikut:

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.518	Sobel test: 1.33863304	0.13543667	0.18069016
b	0.350	Aroian test: 1.26403432	0.14342965	0.20621771
$s_a$	0.319	Goodman test: 1.42821809	0.1269414	0.1532291
$s_b$	0.148	Reset all	Calculate	

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

**Gambar 5. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Kapasitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Mediasi Sistem Pengendalian Internal**

Nilai *probability Sobel test* yaitu sebesar 0,18069016 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak memediasi pengaruh kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah.

c. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal dapat dilihat pada gambar berikut:

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.262	Sobel test: 1.21985738	0.07517272	0.22251894
b	0.350	Aroian test: 1.14692043	0.07995324	0.25141451
$s_a$	0.184	Goodman test: 1.30875109	0.0700668	0.19061868
$s_b$	0.148	Reset all	Calculate	

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

**Gambar 6. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Mediasi Sistem Pengendalian Internal**

Nilai *probability Sobel test* yaitu sebesar 0,22251894 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh adanya kejelasan sasaran anggaran dengan kemampuan menjelaskan sebesar 9,18%. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran, maka semakin tinggi pula efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur I yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,023 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal yaitu sebesar 9,18%. Dengan demikian, efektivitas sistem

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaltsum dan Rohman (2012) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian internal. Menurut Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Adanya sasaran anggaran yang jelas diperkirakan dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern karena adanya sasaran anggaran yang jelas dapat

memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengontrol biaya sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang mengarah kepada tujuan organisasi dan meningkatkan sistem pengendalian intern. Selain itu, sasaran anggaran yang jelas dapat membantu manajemen tingkat atas untuk mengevaluasi kinerja para manajer tingkat lebih rendah sehingga dapat menjaga aktivitas organisasi agar tetap mengarah kepada tujuan semula.

#### 4.2.2. Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kapasitas SDM terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur I yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh kapasitas SDM terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh kapasitas SDM terhadap sistem pengendalian internal yaitu sebesar 17,22%. Dengan demikian, efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan kapasitas SDM dengan kemampuan menjelaskan sebesar 17,22%. Semakin baik kapasitas SDM, maka semakin tinggi pula efektivitas sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas (Yosefrinaldi, 2013). Informasi yang dihasilkan akan menunjang efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

#### 4.2.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh langsung yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur I yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,159 lebih besar

dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal hanya sebesar 2,92%, sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan efektivitas pengendalian internal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan. Namun, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pelaporan pengelolaan keuangan daerah membuat pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

#### 4.2.4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur II yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien path pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 0,009 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 8,70%. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan kejelasan sasaran anggaran dengan kemampuan menjelaskan sebesar 4,49%. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azmi *et.al.* (2014) yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daulay (2015) yang mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan OPD.

Sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk melaksanakannya. Kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sasaran dirumuskan secara spesifik dan jelas serta terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sasaran anggaran yang jelas membuat pencapaian sasaran melalui pelaksanaan anggaran menjadi lebih mudah. Pada sisi lain, target yang jelas, terukur, realistis serta mencantumkan batas waktu

pencapaian sasaran akan membuat pengelolaan keuangan daerah memiliki arah yang jelas.

#### 4.2.5. Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur II yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien *path* pengaruh kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 0,040 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 4,37%. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan kapasitas SDM dengan kemampuan menjelaskan sebesar 4,37%. Semakin baik kapasitas SDM, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azmi *et.al.* (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafiah (2016) yang mengungkapkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Puspita dan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.2.6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur II yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien *path* pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 0,017 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 5,91%. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan kemampuan menjelaskan sebesar 5,71%. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) yang mengungkapkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Windyaningrum (2009) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

#### 4.2.7. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini terbukti melalui hasil pengujian hipotesis dalam persamaan analisis jalur II yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien *path* pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Besarnya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 18,23%. Dengan demikian, semakin baiknya sistem pengendalian internal akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dengan kemampuan menjelaskan sebesar 18,23%.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prisanti *et.al.* (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (pengelolaan keuangan daerah). Penelitian ini juga mendukung hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Jonathan (2013) dan Romadhoni *et.al.* (2015) yang juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (pengelolaan keuangan daerah). Sementara itu, hasil penelitian Asih dan Pratomo (2018) mengungkapkan bahwa kepuasan online ternyata secara positif memengaruhi kesediaan-e untuk pembeli pakaian *online* wanita.

#### 4.2.8. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening tidak mampu mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil pengujian hipotesis efek tidak langsung menggunakan *Sobel Test* dengan  $0,09651534$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$ . Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Besarnya pengaruh tidak langsung kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal yaitu sebesar  $7,48\%$ . Namun besarnya pengaruh tersebut tidak berdampak pada efektivitas pengendalian internal yang kemudian mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Kenis, 1979). Namun demikian, kejelasan sasaran anggaran belum mampu memberikan dampak yang besar sistem pengendalian internal sehingga sistem pengendalian internal mampu mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.

#### 4.2.9. Pengaruh Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening tidak mampu mempengaruhi kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil pengujian efek tidak langsung menggunakan *Sobel test* dengan nilai *p-value* sebesar  $0,18069016$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$ . Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Besarnya pengaruh tidak langsung kapasitas SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebesar  $10,25\%$ . Namun besarnya pengaruh tersebut tidak berdampak pada efektivitas pengendalian internal yang kemudian mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita dan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening tidak mampu mempengaruhi kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windyaningrum (2009) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian intern, sedangkan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

#### 4.2.10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening tidak mampu mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil pengujian efek tidak langsung menggunakan *Sobel test* dengan nilai *p-value* sebesar  $0,22251894$  lebih besardari taraf signifikansi  $0,05$ . Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Besarnya pengaruh tidak langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal hanya sebesar  $4,22\%$  sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berdampak kepada efektivitas pengendalian internal yang pada tahap selanjutnya juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita dan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening tidak mampu mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windyaningrum (2009) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian intern, sedangkan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Kapasitas SDM memiliki pengaruh langsung terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Kapasitas SDM memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.
9. Kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.
10. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi lebih mengoptimalkan Pemanfaatana Teknologi Informasi seperti program aplikasi SIMDA dengan jaringan internet yang memadai yang apat menghasilkan informasi LKP yang berkualitas, sehingga pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pada LKPD Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kejelasan sasaran anggaran dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan, meningkatkan kualitas kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pengalaman dibidang akuntansi, dan mengoptimalkam pemnfaatan teknologi infoormasi dalam penggunaan computer dan jaringan internet sebagai penghubung informasi pemerintah

- Provinsi Jambi sehingga system engendalian internal di Pemerintah Provinsi Jambi dapat mendukung pengelolaan keuangan daerahnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah seperti komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, partisipasi masyarakat, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan lain sebagainya.
4. Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor selain sistem pengendalian internal yang mampu memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti partisipasi anggaran, kepemimpinan, budaya organisasi dan lain sebagainya.

## DAFTAR REFERENSI

- Azmi, G., Darwanis and Abdullah, S. (2014) 'Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Aceh', *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(13), pp. 10–22.
- BPK (2017) 'Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017', *www.bpk.go.id*, p. 432. Available at: <https://www.bpk.go.id/ihaps>.
- BPK Perwakilan Jambi (2015) *BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh TA 2014*, *jambi.bpk.go.id*.
- Daulay, A. F., Arfan, M. and Basri, H. (2015) 'Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe', *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(3), pp. 39–48.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S. and Saputra, M. (2016) 'Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya daerah (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)', *Jurnal Akuntansi Pacasarjana Universita Syiah Kuala*, 5(4), pp. 77–86.
- Indriantoro, N. and Supomo, B. (2013) *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Kaltsum, U. and Rohman, A. (2012) 'Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja

- Perangkat Daerah Kota Salatiga), 1(1), p. 3.
- Karmila, Tanjung, A. R. and Darlis, E. (2014) 'Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)', *Jurnal Sorot*, 9(1), pp. 1–121.
- Kenis, I. (1979). Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review LIV (4)*. 707-721.
- Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2007) *Sistem Informasi Manajemen. Edisi ke-10. Terjemahan Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P.* Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah (2008) *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Puspita, D.H.R., dan Amalia, D. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon). *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit Vol 3, No 2 (2014)*.
- Retaduari, E. A. (2017) *BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi*, *news.detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-3513210/bpk-opini-wtp-bukan-jaminan-tak-ada-korupsi> (Accessed: 27 October 2018).
- Singarimbun, M. and Effendi, S. (2006) *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana, N. and Ibrahim (2017) *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono (2012) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*
- Yosefrinaldi (2013) 'Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD Se-Sumatera Barat)', *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
-